#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung beberapa dekade dan sampai saat ini belum memperlihatkan titik terang penyelesaian final bagi kedua belah pihak. Upaya-upaya perdamaian yang selama ini terus diusahakan oleh berbagai pihak selalu kandas di tengah jalan. Berlarut-larutnya konflik serta tertundanya penyelesaian final tersebut telah menyebabkan penderitaan yang sangat berat, khususnya bagi rakyat Palestina.

Inti dari permasalahan Palestina dan Israel adalah bagaimana cara memulihkan kedaulatan yang sah bagi rakyat Palestina dan mendirikan negara yang merdeka di tanah leluhurnya sendiri. Perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan tujuan tersebut merupakan masalah yang hakiki dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan Internasional.

Dari paparan diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat masalah tersebut dengan menggunakan cara pandang dari sisi dalam tubuh bangsa Palestina itu sendiri. Dalam hal ini permasalahannya adalah konflik perang saudara antara Hamas dan Al-fatah didalam tubuh bangsa Palestina, dimana konflik ini juga merupakan salah satu faktor kunci utama dari berlarut-larutnya penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul:

PROSPEK PERDAMAIAN ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL PASCA
PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI HAMAS DAN AL-FATAH DI
MAKKAH TAHUN 2007.

(PEACE PROSPEC BETWEEN PALESTINA AND ISRAEL PASCA PEACE AGREED AGREEMENT HAMAS AND AL-FATAH AT MAKKAH 2007).

# **B. TUJUAN PENELITIAN**

- Mengetahui sejauh mana keefektifitasan pengaruh perdamaian antara Hamas dan Alfatah terhadap hubungan antara Palestina dan Israel.
- Melihat reaksi dunia Internasional terhadap peluang perdamaian Palestina-Israel, dan masa depan rakyat Palestina.
- Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### C. LATAR BELAKANG

Konflik Israel-Palestina adalah bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas, yaitu konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel yang berkepanjangan dan menimbulkan kerugian moril, materil, dan jiwa membuat berbagai negara-negara di belahan dunia turut bersimpati. Simpati terhadap Palestina tersebut sebagian besar datang dari negara-negara Islam, serta dukungan terhadap eksistensi Israel datang karena kuatnya lobi Yahudi pada

parlemen-parlemen Negara Adi Kuasa yang berhasil menduduki porsi penting dalam struktur birokrasi di negara-negara maju.

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan Solusi Dua Negara dan sebagian lagi menganjurkan Solusi Dua Bangsa dengan Satu Negara Sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Selama ini telah terjadi konflik yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak, pada berbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam berbagai tingkatannya tentang penganjuran atau penggunaan taktik-taktik kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dan lain-lain. Ada pula orang-orang yang bersimpati dengan tujuan-tujuan dari pihak yang satu atau yang lainnya, walaupun itu tidak berarti mereka merangkul taktik-taktik yang telah digunakan demi tujuan-tujuan itu.

Konflik antara Palestina dan Israel adalah konflik yang bersifat tetap, yang apabila dilihat dari lamanya waktu konflik, setidaknya pernah terjadi lima kali perang besar antara Arab (pro-Palestina) dengan Israel, yaitu pada tahun 1948, tahun 1956, tahun 1967, tahun 1973 dan tahun 1982. Perang tersebut tidak hanya melibatkan negara-

negara Arab disekitar wilayah konflik tapi juga negara yang jauh dari wilayah itu, yaitu Amerika Serikat atau Inggris pada pasca Perang Dunia II sampai sekarang.<sup>1</sup>

Keterlibatan negara-negara besar tersebut pada umumnya adalah untuk menetralisasikan kepentingan-kepentingan negara mereka terutama di bidang politik, ekonomi dan militernya di Timur-Tengah, namun kepentingan yang terbesar adalah kepentingan akan minyak<sup>2</sup>

Banyak perundingan yang telah diupayakan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung berabat-abat itu, perundingan-perundingan tersebut antara lain adalah Perundingan Oslo I tahun 1993, perundingan di kota Taba Mesir tahun 1995 yang lebih dikenal dengan Perundingan Oslo II, Perundingan Hebron pada tahun 1997 dan perundingan di Wye Plantation Amerika Serikat pada tahun 1998 yang dikenal dengan Perundingan Wye River I yang termasuk dalam perundingan tahap transisi menurut kerangka kesepakatan Oslo.<sup>3</sup>

Namun diantara perundingan-perundingan tersebut yang termasuk dalam perundingan final adalah perundingan Sharm El Sheikh Mesir pada tahun 1999 yang dikenal dengan Perundingan Wye River II dan perundingan di Camp David Amerika Serikat pada tahun 2000 yang dikenal dengan Perundingan Camp David II..<sup>4</sup>

Sejak Persetujuan Oslo, pemerintah Israel dan Otoritas Palestina (OP) secara resmi telah bertekad untuk akhirnya tiba pada Solusi Dua Negara. Masalah-masalah utama yang tidak terpecahkan di antara kedua pemerintah ini adalah:

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sinar Harapan, 2 Desember 2003

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad farra, "Prospek Perdamaian Timur Tengah Pasca Perang Teluk", dan M. Riza Sihbudi (ed) Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru, Pustaka Hidayah, Jakarta hal 172.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Harmiyati, Draft Buku Teks, *Konflik Israel-Palestina*, hal 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

- Status dan masa depan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang mencakup wilayah-wilayah dari negara Palestina yang diusulkan.
- 2. Keamanan Israel.
- 3. Keamanan Palestina.
- 4. Hakikat masa depan negara Palestina.
- 5. Nasib para pengungsi Palestina.
- 6. Kebijakan-kebijakan pemukiman pemerintah Israel, dan nasib para penduduk pemukiman itu.
- Kedaulatan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Bukit Bait Suci dan kompleks Tembok (ratapan) Barat

Masalah pengungsi muncul sebagai akibat dari perang Arab-Israel 1948. Masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur muncul sebagai akibat dari Perang Enam Hari pada 1967.

Mengingat pembatasan-pembatasan di atas, setiap gambaran ringkas mengenai sifat konflik ini pasti akan sangat sepihak. Itu berarti, mereka yang menganjurkan perlawanan Palestina dengan kekerasan biasanya membenarkannya sebagai perlawanan yang sah terhadap pendudukan militer oleh bangsa Israel yang tidak sah atas Palestina, yang didukung oleh bantuan militer dan diplomatik oleh Amerika Serikat. Banyak yang cenderung memandang perlawanan bersenjata Palestina di lingkungan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai hak yang diberikan oleh persetujuan Jenewa dan Piagam PBB. Sebagian memperluas pandangan ini untuk membenarkan serangan-serangan, yang seringkali dilakukan terhadap warga sipil, di wilayah Israel itu sendiri.

Negara-negara yang bersimpati dengan aksi militer Israel dan langkah-langkah Israel lainnya dalam menghadapi bangsa Palestina cenderung memandang tindakan-tindakan ini sebagai pembelaan diri yang sah oleh bangsa Israel dalam melawan kampanye terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas, Jihad Islami, Al Fatah dan lainnya, dan didukung oleh negara-negara lain di wilayah itu dan oleh kebanyakan bangsa Palestina, sekurang-kurangnya oleh warga Palestina yang bukan merupakan warga negara Israel. Banyak yang cenderung percaya bahwa Israel perlu menguasai sebagian atau seluruh wilayah ini demi keamanannya sendiri. Pandangan-pandangan yang sangat berbeda mengenai keabsahan dari tindakan-tindakan dari masing-masing pihak di dalam konflik ini telah menjadi penghalang utama bagi pemecahannya.<sup>5</sup>

Di dalam tubuh bangsa Palestina sendiripun telah lama terjadi perpecahan antara dua kelompok besar politik, kelompok pejuang Hamas dan Al-Fatah yang telah berlangsung lama dan mengakibatkan kerugian moril, materil bahkan ribuan jiwa terbuang percuma. Al-Fatah dan Hamas saling berbeda pendapat tentang tujuan-tujuan bagi bangsa Palestina.. Dan hal ini juga mengakibatkan tidak pernah terciptanya suatu bentuk kesepakatan dalam mencari solusi kongkrit penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Gerakan Hamas sendiri adalah gerakan jihad dalam arti yang luas menurut konsepsi jihad. Ia merupakan bagian dari gerakan Kebangkitan Islam (an nahdhah al islamiyah) yang meyakini bahwa kemerdekaaan merupakan gerbang utama bagi kemerdekaan rakyat Pelestina, mulai dari Sungai Yordan sampai Laut Tengah. Hamas

<sup>5</sup> www.wikipedi.org.id

adalah gerakan kerakyatan, karena merupakan ekspresi kongkret dari arus rakyat yang luas dan mengakar dalam barisan putra-putri bangsa Palestina dan Umat Islam, yang memandang bahwa Aqidah dan Motivasi ke-Islaman adalah dasar yang tepat untuk melawan musuh yang membawa motivasi aqidah dan program yang bertentangan dengan seluruh upaya kebangkitan yang terjadi di dalam Umat (an *nahdhatu fil ummah*). Dalam barisan Hamas, terhimpun semua unsur umat Islam yang meyakini pemikiran dan prinsip-prinsipnya, sanggup memikul seluruh konsekuensi pertarungan dan perlawanan menghadapi proyek Zionisme.

Hamas menyebarkan manifesto pendiriannya pada tanggal 15 Desember 1987, meskipun kemunculannnya berakar mulai sejak dekade 40-an. Pada abad ini Hamas lahir sebagai hasil dari akumulasi berbagai faktor yang dialami oleh rayat Palestina, sejak tragedi (*nakbah*) pertama tahun 1948 secara umum dan kekalahan perang tahun 1967 secara khusus. Dari bebagai faktor tersebut muncul dua faktor utama yaitu: (1) perkembangan politik masalah Palestina dan akibat-akibatnya hingga akhir tahun 1987, (2) dan kebangkitan Islam di Palestina serta hasil- hasil yang dicapai hingga pertengahan dekade 80-an.

Kemunculan Hamas menimbulkan kegelisahan Israel. Aparat Intelijen Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk mengawasi Hamas dan pimpinannya. Begitu rezim Imperialis Israel melihat sambutan masa dalam aksi-aksi mogok, dan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan Hamas sejak awal bertolak dan keluarnya Dokumen Gerakan, maka mulailah penangakapan bertubi-tubi dilancarkan terhadap kader-kader Gerakan dan para pendukungnya sejak saat itu.

Sekarang ini, Hamas berdiri sebagai kekuatan pertama dalam menghadapi proyek Zionisme Israel. Hamas, meski menghadapi aksi permusuhan yang luas, masih menjadi kekuatan yang mampu menjaga kelanjutan issu Palestina, serta memberikan kepada rakyat Palestina, seluruh bangsa Arab, Dunia Islam dan seluruh pencinta kemerdekaan di dunia rasa percaya akan kemungkinan menghadapi proyek Zionisme Israel. Pada dekade 90-an adalah masa keemasan Hamas, yang mampu memberikan harapan kekalahan dan kehancuran Israel.

Gerakan Hamas telah menegaskan berkali-kali bahwa Hamas tidak anti perdamaian. Bahkan Hamas menyetujui perdamaian, mengajak kepada perdamaian, dan berusaha merealisasikan perdamaian. Hamas sepakat dengan seluruh negara-negara di dunia tentang perlunya perdamaian mendominasi seluruh penjuru dunia. Tetapi Hamas hanya menyetujui perdamaian yang adil yang mengembalikan seluruh hak-hak bangsa Palestina, sehingga mereka bisa menggunakan hak mereka dalam kemerdekaan, kembali ke tanah air mereka, dan menentukan nasib mereka. Hamas memandang bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai hingga saat ini, tidak memenuhi tuntutantuntutan rakyat Palestina, juga tidak memenuhi batas minimal keinginan mereka.

Sedangkan Fatah atau *Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini* atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah <u>sebuah</u> partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, namun adalah salah satu faksi dalam\_PLO, sebuah konfederasi multipartai.

<sup>6</sup> www.infopalestina.com

Fatah didirikan pada tahun 1958 atau 1959 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir; salah satunya Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 menjadi pemimpin dalam PLO. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga meninggal dunia pada tahun 2004. Posisinya sebagai ketua Fatah digantikan Farouk Kaddoumi. Kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah kemenangan kelompok Hamas pada Pemilu parlemen tahun 2006 lalu di Palestina.<sup>7</sup>

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al-fatah, pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al-fatah-nya, menyerang Israel secara terus-menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.

Organ utama lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Terpenting dari antaranya ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasehat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> www.wikipedia.org/wiki/fatah

Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota, merupakan juga Parlemen Palestina.<sup>8</sup>

Sebelum terjadinya kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah di Makkah, Hamas terlebih dahulu telah memenangkan Pemilihan Umum di Palestina pada bulan Maret 2006<sup>9</sup>, mengungguli Partai-Partai yang lainnya, termasuk Partai Al-fatah itu sendiri. Kemenangan Hamas dalam Pemilu ini semakin memperuncing permusuhan dan perang saudara yang terjadi di antara ke-duannya. Kemenangan Hamas itu juga menyebabkan terjadinya Embargo dan Sanksi-Sanksi Ekonomi lain yang diberlakukan terhadap Pemerintahan Palestina oleh Negara-negara besar barat dan Israel. Presiden Mahmout Abbas sendiri berharap dapat meredakan pertikaian antar-kelompok Palestina itu dan membujuk negara-negara Barat serta Israel mengakhiri sanksi-sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Palestina dengan membentuk pemerintah koalisi persatuan pada Maret, yang mencakup para menteri Fatah di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh (Hamas). Namun, embargo itu masih tetap diberlakukan pada pemerintah Palestina. Presiden Mahmout Abbas sangat kecewa atas berlanjutnya embargo itu. Ia berharap dengan membentuk pemerintah persatuan, sanksi-sanksi itu akan dicabut. <sup>10</sup>

Pertemuan Makkah antara Hamas dan Al-Fatah menghasilkan kesepakatan yang melegakan kedua belah pihak, poin-poin terpenting dari hasil kesepakatan tersebut adalah:

<sup>8</sup> www.wikipedia.org/wiki/PLO

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Antara News, 22 Februari 2007

<sup>10</sup> Antara News, 14 Januari 2007

- 1. Kedua faksi di Palestina itu sepakat untuk berbagi kursi di kabinet , yang segera akan mengakhiri konflik yang sempat meruncing di antara keduanya.
- 2. Langkah penting untuk mencegah perang saudara, menetapkan PM Ismail Haniya tetap memegang jabatannya.
- 3. Pos penting Menteri Dalam Negeri diberikan kepada kelompok independent.
- 4. Al-Fatah akan menerima jabatan Deputi Perdana Menteri<sup>11</sup>

Dokumen itu yang dipuji sebagai awal satu "Era Baru", ditandatangani Kamis malam (22 Februari 2007) oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin partai Fatah dan pemimpin gerakan Hamas di pengasingan Khaled Meshaal, dengan disaksikan Raja Abdullah dari Arab Saudi. 12

Dari berbagai dinamika konflik yang menarik untuk diteliti adalah perundingan atas konflik Hamas dan Al-Fatah yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap prospek perdamaian Israel-Palestina, perundingan tersebut tidak semata-mata untuk menyelesaikan konflik Perang Saudara antara Hamas dan Al-Fatah yang telah lama terjadi, tetapi terhadap kepentingan-kepentingan lain yang mendorong beberapa negara yang terkait khususnya Arab Saudi dan Amerika Serikat.

### D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di tarik pokok permasalahan dan memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana prospek perdamaian

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Http://www.Infopalestina.com indeksberita.asp, 107 <sup>12</sup> Republika, 12 Februari 2007

antara Israel dan Palestina pasca perjanjian kesepakatan damai antara Hamas dan Al-Fatah di Mekkah ?

### E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menyelesaikan rumusan masalah penulis menggunakan konsep/teori:

# 1. Teori Negosiasi

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang tergolong abadi di kawasan Timur Tengah, karena upaya-upaya proses perundingan yang selalu di akhiri dengan kegagalan, disamping karena persoalan yang sudah mengakar kuat hingga sampai anak cucu, juga di sebabkan adanya kelemahan dan perbedaan kedua belah pihak yang sangat mendasar. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi demi tercapainya suatu negosiasi:

"Two element must be present for negotiation take place; there must be both comment interest and issues of conflict. Whithout comment interest there's nothing to negotiate for, whithout issues of conflict there's nothing to negotiate about <sup>13</sup>

Sementara Robert C. Kelment menyatakan bahwa keberhasilan perundingan akan tergantug pada bagaimana menciptakan suatu momen yang tepat. Momen yang tepat bagi suatu perundingan akan sangat tergantung pada :

A. Prinsip dan Pragmatis (*Principle and pragmatism*) artinya sebelum memasuki perundingan pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal prinsip yang telah menjadi sengketa. Untuk mencapai kesepakatan yang prinsip ini maka di perlukan komitmen (*comitment*) dan tanggung jawab moral

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Fred. C. Ikle "Negotiation", dalam Craig dan George, Introduktion to International Politics Prentice Hall. 1980. Hal.57

untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketakan secara timbal balik. Inti dari komitmen itu sendiri dengan dimensi moral bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan mentaati hasil perundingan. Sebelum ada kesepakatan maka berarti belum terdapat momentum yang tepat bagi kedua belah pihak melakukan perundingan.

Sedangkan pragmatis (*pragmatism*) sebagai persyaratan tercapainya perdamaian, atau menurut Kelment "*pragmatism is sine qua non for amuttualy acceptable peace* " artinya perundigan tersebut harus pragmatis atau mudah untuk melaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima oleh kedua pihak sehingga terwujud perdamaian".

Terdapat tiga pragmatisme yang akan memegang peranan dalam proses perundingan perdamaian ;

- a. Adanya keterpaksaan tekanan (*compultion*) yang membuat pihak-pihak yang bersengketa bersedia untuk berunding. Kondisi ini akan dapat menciptakan momentum yang tepat untuk melakukan perundingan.
- b. Pragmatisme yang dilandasi adanya jaminan masa depan yang lebih baik (*vision* of *the future*), yang artinya suatu perundingan dianggap pragmatis apabila memenuhi adanya jaminan masa depan yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak dalam masa datang meskipun mereka harus terlebih dahulu mengorbankan sesuatu.
- c. Pragmatisme dilandasi akan adanya kepentingan (*interest*) yang apabila masingmasing pihak sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk memecahkan status quo berdampak membahayakan kedua pihak sehingga perlu dirubah, walaupun faktor kepentingan sebagai syarat akan keberhasilan sebuah perundingan, tetapi terkadang

juga bisa menjadi penghambat perundingan karena terbentur oleh perbedaan kepentingan yang mendasar.

B. Keberhasilan suatu perundingan harus adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (acknowledgment)<sup>14</sup>. Pengakuan eksistensi kebangsaan atau negara masing-masing akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti diluar inti yang menjadi sengketa mereka. Untuk kedua belah pihak ini mempunyai komitmen untuk saling mengakui berkaitan masalah prinsip yang mereka sengketakan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu negosiasi, seperti yang telah diterjemahkan sebagai berikut : " Harus ada dua element didalam negosiasi : harus ada persamaan kepentingan dan isu-isu dari konflik". Tanpa kesamaan kepentingan tidak ada yang dinegosiasikan, tanpa isu-isu konflik juga tidak ada yang dinegosiasikan<sup>15</sup>. Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi<sup>16</sup>.

Poin terpenting dari hasil kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah adalah kedua faksi di Palestina itu sepakat untuk saling berbagi kursi dikabinet, dan menduduki pos-pos penting didalam pemerintahan Palestina.

Terakhir pengakuan harus dirumuskan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama untuk mencapai kehendak masing-masing tanpa membahayakan kepentingan yang lain. Yang tentu saja nantinya akan lebih meringankan langkah ke dua

 Fred. C. Ikle "Negitiation" dalam Craig dan George, Introduction to International Politics, Prentice Hall, 1980, hal. 57

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Http:/www.Infopalestina.com indeksberita.asp, 106

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> S. L. Roy, *Diplomasi, Rajawali Pers*, Jakarata, hal. 17

negara demi tercapainya suatu bentuk perdamaian yang nyata didalam menjalin Hubungan Bilateral antara Israel dan Palestina kearah yang lebih baik lagi.

### F. HIPOTESA

Melalui pendekatan-pendekatan di atas maka dapat di tarik hipotesis, bahwa hasil dari kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah di Makkah tidak lebih memperbaiki hubungan antara Palestina dan Israel. Hal ini disebabkan oleh :

- 1. Tidak adanya hal-hal yang bersifat prinsip, atau langkah bersama yang disepakati dalam menyelesaikan konflik dengan Israel diantara ke-dua belah pihak.
- 2. Perdamaian tersebut hanya dilandasi akan adanya kepentingan (interest) masingmasing pihak, bukan karna untuk kepentingan rakyat Palestina secara keseluruhan.

#### G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian pada sekripsi ini adalah pada tahun 1993 - 2007 sekarang ini, dari Perundingan Oslo I tahun 1993 sampai dengan perundingan kesepakatan damai antara Hamas dan Al-Fatah di Mekkah tahun 2007.

# H. TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan sekripsi ini adalah data sekunder, yakni dengan mencari data dari berbagai perpustakaan, dari media cetak, media elektronik, dari berbagai makalah, literature, dan berbagai situs-situs webside di internet lainnya yang dapat mendukung penulisan sekripsi ini.

# I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Konflik antara Palestina dan Israel. Berisi tentang awal konflik Palestina dan Israel. Berbagai perperangan dan perjanjian damai yang pernah di tempuh Palestina-Israel, Sikap Dunia Internasional

Bab III Konflik perang saudara antara Hamas dan Al-Fatah, sampai dengan terjadinya kesepakatan damai di Makkah. Berisi tentang sejarah perang soudara antara Hamas dan Al-fatah, sampai dengan terjadinya perjanjian kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah di Makkah.

Bab IV Hal-hal yang melemahkan perjanjian kesepakatan damai Hamas dan Al-Fatah di Makkah.

Bab V Kesimpulan.